

Diskursus Politik dalam Proses Pemekaran Wilayah Pantai Timur

Nurul Zakiyah¹, Muchlis Minako²

¹ Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; zakiyahnurul81@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; muchlisminako@radenfatah.ac.id

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana pemekaran daerah Pesisir Timur yang menginginkan adanya daerah otonom terpisah dari daerah Ogan Komering Ilir yang melalui proses yang begitu panjang dari berbagai jenis perjalanan elite politik lokal. Metode penelitian, penerapan metode menggambarkan secara kualitatif apa strategi penelitian yang lebih mendesak Pencarian makna elit politik berdasarkan teori Pareto (1848-1923). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, pengumpulan data, reduksi data dan penyajian informasi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Membahas perluasan Pantai Timur adalah kebutuhan bersama. diprakarsai oleh elit lokal dengan membangun komunikasi di tingkat pemerintah dan dukungan tingkat masyarakat, (2) proses pembentukan kabupaten baru banyak hambatan yang disebabkan oleh perubahan hukum pemerintah Pusat pada 2013. Demikian keinginan elite politik dan dukungan masyarakat Daerah masih memiliki jalan panjang dan proses untuk dibuat Distrik baru bagus untuk kantor dan untuk mendapatkan dan mendapatkan kekuasaan papan baru

Keywords: Pemekaran Daerah, Proses Pemekaran daerah, Elit Lokal,

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v1i1.1873>

*Correspondensi: Nurul Zakiyah¹,
Muchlis Minako²

Email: zakiyahnurul81@gmail.com ¹,
muchlisminako@radenfatah.ac.id ²

Received: 13-08-2023

Accepted: 29-09-2023

Published: 31-10-2023



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
([http://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

Abstract: *The purpose of my research is to analyze the regional development of Pantai discourse. Timur Calls for Separation of Ogan Kommering Illil Autonomous Region A district that has undergone a long journey of various local political elites. the method of Investigation using the qualitative descriptive method, a more urgent investigative strategy Searching for meaning using the Pareto theory of political elites (1984-1923). Data is collected by: Interview methodology, data collection, data reduction, data presentation and conclusions. Of As a result of this research, (1) it is the discourse of Pantai Timur development Community needs have led local elites to build means of communication Support at government and community levels. (2) New establishment process This district is subject to many restrictions due to changes in the central government's laws. 2014. Hence the aspirations of the political elite and the support of the community There is still a long way to go in the process and process of creating new districts to acquire and acquire positions. and power in the new governing body.*

Keywords: *Regional develoment, regional development process, local elite.*

Pendahuluan

Sistem ini sangat terganggu dengan berakhirnya rezim Orde Baru Perjanjian administrasi dan pemerintah daerah, perubahan sistem kelistrikan setelah pesanan Reformasi pascareformasi baru-baru ini membawa semangat baru perubahan tatanan pemerintah negara. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak ekspresi ketidakpuasan publik di berbagai daerah di Indonesia (Johnson, 2020). Mulailah dengan tempat Hubungan antara negara bagian dan kota madya dianggap tidak adil dan tidak setara Pembangunan, efisiensi pelayanan publik untuk pengolahan sumber daya alam yang tidak stabil. Kemudian itu membuat pemerintah pergi Pelaksanaan otonomi daerah. Upaya percepatan pelaksanaan otonomi daerah dengan berbagai cara Konsistensi begitu penting dan sekarang dipandang sebagai masalah besar karena penyebabnya Percepatan proses pembangunan demokrasi di Indonesia mendapatkan momentum Mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat serta mempercepat proses pemberdayaan (Richards-Gray, 2022) (Schlaufer, 2018).

Mendiskusikan politik (diskursus politik), keinginan dan tuntutan masyarakat di berbagai daerah Jadi otonomi daerah baru yang masif tidak berhenti di situ (Miller, 2020; Singh, 2019). Variasi fenomenal mengalami kondisi yang berkembang pesat dan tidak terkendali. Selain itu, euforia otonomi daerah di pusat terus berlanjut masyarakat yang tidak dibarengi dengan perubahan budaya dan sumber daya manusia memadai Cara kerja dan kualitas pelayanan publik yang ditawarkan kepada warga tidak demikian Tampaknya telah terjadi pergeseran yang signifikan ketika cita-cita Autodate Act lepas landas (Choy, 2018).

Kabupaten OKI saat ini memiliki 18 kelurahan, 314 desa dan 13 kelurahan. dengan ibu kota di daerah Kayu Agung. Wilayah Kabupaten OKI semakin meluas 19.023,47 km² (lebih dari 50 persen luas provinsi Jawa Barat),⁷ dengan daerah Hal ini sangat luas dan membuat pelayanan masyarakat kurang maksimal Seringkali infrastruktur pembangunan tidak merata, itu syaratnya Latar belakang yang menggembirakan dengan keinginan masyarakat wilayah pesisir Timur ingin membentuk kabupaten baru (Bilbao-Jayo, 2018; Foss, 2018). Dulu juga bagian dari kota Ogan Komering Ilir (OKI) juga membentuk Kabupaten Ogan Ilir (OI) tahun ini 2003. Dan hari ini wilayah pantai timur ingin terlibat pemekaran ke kabupaten baru dengan lima kabupaten, yaitu Air Sugian (2.251,07 km²), Tulung Selapan (5.363,85 km²), Cengal (3.038,66km²), Sungai menang (2.305,42 km²) dan Pangkalan Lampam (1.104,75 km²), 8 dari syarat UU No. 32 Tahun 2004 terpenuhi Sedikitnya lima kabupaten harus membentuk kabupaten baru(Fetzer, 2018).

Metode

Dalam karya ilmiah penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Trimithiotis, 2018). Informasi yang disampaikan narasumber kemudian di kumpulkan, kemudian informasi tersebut di jadikan data (kata-kata atau teks) yang kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang

kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang metode persuasif yang berperan dalam konseling akhlak (Portillo, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan Observasi langsung di lapangan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi makna pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dan Pembahasan

Para peneliti menganalisis penyebaran pantai timur Ogan Komering di wilayah Iilir. membahas debat politik yang mendalam proses pemekaran dan alasan mengapa kawasan pantai timur tidak bisa menjadi kabupaten baru Informasi tambahan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

A. Diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur

Berawal dari kepedulian sosial, meski sedikit tahun lalu Pembahasan tentang pemekaran kawasan pantai timur pada awalnya memiliki beberapa sisi positif dan kerugian dalam masyarakat, namun seiring berjalannya waktu wacana tersebut berubah Dukungan masyarakat karena pembagian ini sebenarnya adalah sebuah perubahan dan mendorong pembangunan daerah. Pembahasan pemekaran daerah Namun, wilayah timur OKI muncul jauh sebelum pemekaran wilayah muncul Itu adalah curahan kata-kata yang belum dilakukan.

Namun, langkah tersebut muncul saat muncul ide pemisahan dari DPRD OKI Baru kemudian menggunakan hak inisiatif dewan untuk membagi distrik Ogan Iilir dan Pantai Timur mengusulkan dibuatnya Pemekaran. Di dalam Saat itu, perpanjangan rentang OKI antara Ogan Iilir dan Pantai mulai goyah timur Ide-ide itu muncul dari diskusi-diskusi kecil antara mahasiswa dan kaum muda Siapa pun yang ingin mengubah wilayahnya adalah bagian dari gagasan ini Kembangkan dengan membuka forum komunitas untuk dukungan lain Mereka juga mencari seseorang yang mengetahui dan mengelola pesanan Ide ini sangat sulit. Langkah pertama adalah membentuk komite yang sesuai Mengumpulkan dukungan berupa tanda tangan dari masyarakat luas dan mendukung tokoh-tokoh dari kabupaten mereka ingin bergabung. Dia Lima kecamatan yang terlibat dalam pembentukan kabupaten adalah kecamatan Sungai Air Sugian, Pampangan, Tulung Selapan, Cengal dan sungai menang. Skor pekerjaan komite yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan manfaat umum dalam bentuk barang Total ada 13.125 tanda tangan. Itu cukup Keinginan orang-orang di pantai timur. Kemudian bentuk tank untuk pertempuran Atas nama panitia pendiri Dewan Pemerintahan Pantai Gading, Presiden adalah dr. S. Rusmin Nuryadin und Dr. Lamtasim Dasutra.

Jika melihat dari segi OKI sendiri, mereka memang sedang bergolak terbagi antara Ogan Iilir dan pantai timur. Tapi lokasi pantai Saat itu, Timur adalah OKI yang lemah di DPRD, meski wakil DPRD adalah H. Fikri OKI dan perwakilan

penduduk Pantai Timur juga tidak memiliki kekuasaan Politik di DPRD OKI. untuk Ogan Ilir juga kuat untuk itu Perpanjangan Selain itu, pemekaran Ogan Iliri sendiri dimotori oleh Mawardi Yahya OKI sebagai ketua DPRD, maka Ogan Iliri sendiri yang memiliki kekuasaan untuk itu untuk pensiun dari OKI. Selain dana, mereka punya kekuasaan untuk menentukan kebijakan politik di DPRD OKI. Sebaliknya, Mawardi Yahya lebih fokus pada divisi Ogan Illyrian daripada pantai timur.

Karena itu diperlukan tindakan nyata berupa Penolakan keputusan DPRD OKI. Kekecewaan para pengunjung pantai Timur kemudian melakukan operasi besar-besaran di wilayah OKI untuk melakukan tekanan DPRD dan Pengurus Kabupaten OKI. 26 September 2002. Melakukan forum baru untuk pertempuran, yaitu Formasi Perjuangan Forum Kabupaten Pesisir Timur tempat kedudukan pimpinan berada kecamatan Pampangan, Tulung Selapan, Sungai menang, air sugihan dan Cengal. Membutuhkan sirkuit OKI untuk dipecah menjadi tiga sirkuit. Aksi massa dilakukan dengan kunjungan ke DPRD dan pengurus OKI. sekitar 800 kelompok gereja Pantai Timur dari Kecamatan Tulung Selapan, Pampangan, Cengal, Sungai menang dan Air Sugian datang Dewan Direksi OKI. yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Pembentukan Kabupaten Pantai Timur OKI jatuh ke tangan DPRD dan Kabupaten OKI di Kayuagung. Kedatangan 800 warga tersebut dikoordinir oleh Rusmin Nuryadin (Tulung Selapan), Hamka (Pampangan), Heisen Hower (Cengal) dan Alipir (Udara). Kedatangan rombongan warga Pesisir Timur di gedung DPRD OKI Kayuagung sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu para anggota dewan sedang duduk bersidang penuh Mendengar pendapat umum dari anggota tentang APBD OKI 2002. Baru setelah pertemuan berakhir, perwakilan dari lima kecamatan berkumpul Perwakilan DPRD OKI Taufik Hasdipa dan Ketua Tim Penyuluh OIC Ir Turmudi. Karena keinginan warga Pantai Timur, mereka mengatakan akan membicarakannya dengan eksekutif Usai bertemu DPRD OKI, dilanjutkan kunjungan OKI ke Kantor Dewan Negara melalui 11 perwakilan warga yang dipimpin oleh Rusmin nunyad Mereka disambut oleh Sesdakab OKI didampingi Dr. H. Indra Rusdi diterima Ketua Pelaksana Dr. Nazaruddin Badar. OKI memindahkan Sekretaris Kantor Wilayah Keinginan yang sama adalah agar OKI tidak hanya meluas ke tiga distrik saja dua kabupaten, seperti yang diusulkan ke pemerintah pusat.

Berdasarkan tanggapan, itu tidak dianggap serius Mereka memperjuangkan pemekaran pantai timur karena punya kepentingan Perluas Ogan Iliri dan lebih fokus untuk memperluas Ogan Iliri di Pantai Timur Kemudian melalui perwakilan dan pernyataan mereka Perwakilan warga pantai timur yaitu Rusmin Nuryadin, Hajar, Joni Kusnadi, Yapan Nanang dan Hamka. Mereka dengan tegas menolak rekomendasi DPRD OKI dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STPDN)

yang akan membagi OKI menjadi dua kabupaten yaitu Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (wilayah utama).

Lihat persyaratan berdasarkan PP 78 Tahun 2007, yang meliputi pendirian, penghapusan dan Penggabungan wilayah sesuai dengan Pasal 17 yaitu:

- a) Keinginan mayoritas masyarakat setempat berupa keputusan BPD ke forum komunikasi desa dan desa atau nama lain Kecamatan pada wilayah yang memenuhi syarat cakupan kabupaten/kota yang diperluas.
- b) DPRD Kerajaan/Kota dapat memutuskan untuk menerima atau menolak Upaya berupa keputusan DPRD berdasarkan keinginan mayoritas masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan forum komunikasi desa untuk Kelurahan.
- c) Manajer Distrik/Walikota memutuskan apakah akan menerima atau menolak upaya internal Keputusan gubernur/walikota berdasarkan hasil survei daerah.
- d) Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan
- e) Gubernur memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak fasilitas yang diusulkan berdasarkan evaluasi studi regional.
- f) Gubernur membuat usulan pembentukan calon kabupaten/masyarakat DPRD provinsi
- g) DPRD kabupaten memutuskan menerima atau menolak usul tersebut pembentukan lingkaran/kota.
- h) Jika gubernur menyetujui usul pembentukan kabupaten/kota, Gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada presiden dari menteri.

Usai rapat di kawasan DPRD, warga pesisir timur mulai berdatangan Kantor Gubernur Sumsel, sekitar pukul 13.00 mereka membentangkan spanduk dan berkumpul untuk menuntut pembagian OKI menjadi tiga distrik. Pemprov Sumsel kemudian menerima perwakilan warga melalui perwakilan Direktur Kantor Administrasi Umum H. Kamil Noh, SH. Dalam pertemuan pukul Saya sebenarnya menerima tawaran ini, tetapi tawaran ini harus diajukan Setelah itu DPRD dan Bupati OKI diserahkan sementara kepada gubernur Keinginan warga pantai timur diperhitungkan. Jika proposal ini tercapai Gubernur melalui Bupati, kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat mengutus timnya untuk meneliti kemungkinan kemungkinan. Dijelaskan pula Diskusi yang berkembang berdasarkan keinginan warga Pantai Timur dapat diterima. Sayangnya, usulan Pantai Timur tertunda karena Gubernur Sumatera Selatan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tepatnya OKI dibagi menjadi 2 kecamatan. Tetapi keputusan belum final karena Mendagri Saya belum memutuskan proposal itu. Proposal ini dapat berubah tetapi diperlukan

Berdasarkan rekomendasi Gubernur OKI kepada Gubernur Kemudian pemkab mengusulkan untuk mengubah perpanjangan tersebut Untuk mendapatkannya, OKI harus mengandalkan surat Gubernur kepada Gubernur Hentikan ekspansi OKI, yang memberi harapan bisa diubah tapi Sebelumnya, Gubernur OKI juga menyetujui pemekaran OKI menjadi dua kabupaten. Apakah Bupati OKI bisa bertanya dan menulis surat? bahwa gubernur dapat mengubah pembagian OKI. sebelumnya juga Presiden Kabupaten OKI tidak sesuai dengan perpanjangan pantai timur. Prosedur sebelumnya juga tidak demikian untuk mendapatkan hasil dari DPRD OKI untuk mengontrol pemekaran OKI jadi orang pantai timur harus berjuang untuk kedatangannya DPRD dan Pemprov Sumsel menuntut keadilan. Pada titik ini, terlalu lama lalu mengganti perjuangan lagi untuk menjadi Presidium Perpanjangan Wilayah Timur OKI, yang berasimilasi singkat PPKT-OKI. Yaitu dalam bentuk Presidium yang dipimpin organisasi ini Sekjen yang saat itu terpilih menjadi Sekjen Ajar Etikana.

Hal ini dilakukan untuk memperjelas peran lobi dalam partai politik Dapatkan dukungan untuk perluasan pantai timur. Artinya, elit lokal Mereka yang berada di Pantai Timur yang telah bergabung dengan partai politik harus melobi masing-masing pihak Hal ini terjadi baik secara regional maupun regional Provinsi, itu adalah strategi untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak. Selain itu, organisasi PPKT-OKI memiliki Presidium yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan di bawahnya adalah garis untuk Presiden Biro. Begitu juga setiap elit lokal Tokoh masyarakat dapat diundang ke kursi kepresidenan Ketuo. sekarang digunakan melobi atas nama saya, yaitu ketua presidium.

Kemudian presidensi pemekaran wilayah timur OKI berlangsung hasil pertemuan dengan DPRD OKI, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Masyarakat menyampaikan keinginannya kepada DPRD Kabupaten OKI Implementasi pemekaran pantai timur.
- b) Anggota DPRD Kab.OKI berdialog dengan Bupati untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat
- c) Anggota DPRD Kab. Kehadiran OKI setuju untuk mengatur proses tersebut berhak menginvestigasi Country Manager OKI, karena ada dugaan Country Manager OKI telah melakukan hal tersebut. Praktek yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku Bupati OKI mengeluarkan kebijakan yang meresahkan masyarakat pesisir Timur
- d) Seorang anggota parlemen distrik, OKI, mengusulkan hak angket.

Untuk melawan pembagian wilayah pantai timur mengalami banyak belokan yang sangat panjang. Itu masih terkendali Pertempuran dimulai dengan masuknya surat proposal, ditandatangani 13.125 People in 2001, University of Public Administration research STPDN yang kemudian diumumkan sebagai sirkuit OKI diperluas menjadi 3 Kabupaten dan hasil keputusan DPRD OKI yang

bisa memecah belah OKI Pada tahun 2003, pemerintah kota melakukan aksi besar-besaran hanya di dua kabupaten Pesisir timur DPRD dan pemerintahan OKI kemudian melanjutkan aksi massanya PP 129 diubah oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, tidak ada tindak lanjut. 2000 diubah menjadi PP 78 pada saat pembentukan 2007, penghapusan dan reunifikasi wilayah yang membentuk militer Pantai Timur harus melengkapi ulang persyaratannya, Selain itu, beberapa perubahan dilakukan pada Perubahan manajemen yang mendukung ekspansi. dalam usahanya Dalam hal ini, elit lokal berbagi peran mulai dari level paling bawah ke tingkat menengah. Semua elemen khusus pantai timur masih terhubung komunikasi dengan teman lain. Apakah pejabat pemerintah, elit politik, partai politik, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri Hal ini sesuai dengan pernyataan Pareto bahwa masyarakat menurutnya terdiri dari dua bagian Kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elit) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elit), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. elit yang memerintah, yang menurut dia berkuasa karena bias menggabungkan kekuasaan-kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting. Sedangkan elit yang tidak memerintah, elit mampu meraih kekuasaan dan kedudukan dengan dua cara, yaitu: (1) kekuasaan atau kekerasan fisik, dan (2) siasat dan strategi politik. Hal ini yang di lakukan oleh Presidium Pemekaran kawasan Timur-OKI (PPKT-OKI) dengan terus menjalin komunikasi dan kerjasama agar terjadi percepatan dalam pelaksanaan proses pemekaran Memang pemekaran saat itu semangat bersatu untuk kebutuhan bukan untuk kepentingan politik demi mencapai cita cita terbentuknya Kabupaten Pantai Timur. Namun pada proses ini tetap berlanjut hingga pada DPR-RI memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 RUU DOB yang di ajukan ke parlemen.

B. Penyebab Pemekaran Kabupaten Pantai Timur Belum Bisa Menjadi Kabupaten Baru

Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran wilayah lebih mungkin terjadi menjadi sarana pembagian kekuasaan untuk kepentingan politik. itu bagus terhadap perluasan kesejahteraan daerah hadirin Akan selalu ada perluasan, intinya berdasarkan usaha masyarakat Ada elit politik yang berjuang untuk kekuasaan. Pertanyaan ekspansi yang digunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam pemilihan untuk mendapatkan dukungan dan kursi dalam kekuasaan. Sebenarnya perpanjangan Kawasan Pantai Timur ini hanya digunakan oleh elit politik sebagai alat perebutan kekuasaan. Buktinya, tidak ada upaya untuk membentuk pembagian wilayah pantai timur sirkuit baru. Bahkan jika Anda memasukkan perjuangan untuk ekspansi Pantai Timur sudah hampir 20 tahun. Orang-orang pantai timur

hanyalah korban politik pilihan apapun Desas-desus beredar tentang Divisi Pantai Timur Simpati dari pantai timur seolah-olah dialah yang melakukannya berjuang untuk ekspansi tetapi setelah mendapatkan dukungan dan kursi Nyatanya, ekspansi Pantai Timur masih belum berkembang Dia mengatakan dia ingin berjuang untuk ekspansi sebelum berkembang. Benda Pak Ajar Etikana mengatakan mereka adalah orang yang nyata berjuang untuk ekspansi.

Mereka berjuang untuk perluasan pantai timur dan hanya menunggu untuk dibuka Moratorium, tapi dengan adanya kontes pilkada, sama-sama peneliti Orang-orang melihatnya seolah-olah mereka pernah bertarung sebelumnya dua karakter ini. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan pembentukan daerah otonom Hanya jika ini pertanda bahwa muatan politik cenderung merugikan masyarakat. Sangat terbuka apakah ini akan berlanjut, meskipun itu bukan bagian dari pemilihan Perselisihan di tubuh batin, persatuan yang rapuh, kepercayaan di antara mereka Manajer lain berkurang, pro dan kontra begitu kuat, begitu pula kontroversi karena mereka tidak setuju memperjuangkan perluasan Pantai Timur. Saat ada retakan di dalam tubuh, terjadi akselerasi tujuan sebenarnya memperluas otonomi daerah tertunda sendiri tidak terjadi. Perluasan wilayah diramalkan Kemajuan daerah telah gagal bahkan di daerah itu sendiri. Tujuan Terbentuknya DOB hanyalah mimpi yang tidak dapat dibuktikan dalam kenyataan atau gagal.

Jadi wilayah Pantai Timur belum terlihat adanya perpecahan, bukan karena tuntutan yang belum selesai tetapi karena kebijakan moratorium pemerintah Pemekaran sehingga 65 DOB disodori RUU untuk diserahkan ke DPRRI memutuskan untuk tidak mengambilnya. Termasuk calon Kabupaten Pesisir Timur siapa Belum bisa diperluas karena terkendala kebijakan pemerintah. Sebaliknya Pendekatan perluasan ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi wilayah pantai timur Memperluas masyarakat pesisir timur lebih dekat dengan pelayanan publik, Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukanya kran pemekaran daerah hal ini telah membuka lebar kembali untuk pemekaran wilayah yang ada di Indonesia kemudian di Sumatra Selatan juga merencanakan untuk pemekaran wilayah di antaranya kabupaten PALI pemekaran dari kabupaten Muara Enim di tahun 2012 lalu kemudian di susul MURATARA pemekaran dari kabupaten Musi Rawas di tahun 2013. Sedangkan di wilayah lain di Sumatra Selatan sedang bergejolak untuk melakukan pemekaran juga ialah wilayah Pantai Timur yang ingin mekar dari Kabupaten OKI dan Kikim Area dari Kabupaten Lahat. 2 calon Kabupaten baru ini sudah dalam proses dan juga sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

Berkas proposal juga sudah diserahkan ke menteri dalam negeri. Beberapa langkah lagi Akan ada daerah baru. Prosesnya melalui tahapan dan mekanisme yang panjang Sesuai PP 78 Tahun 2007. Kawasan Pesisir Timur Kabupaten OKI

selangkah lagi menjadi kabupaten baru karena sudah menyusun rencana Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Timur. Kemudian dituangkan dalam Amanat Presiden (AMPRES) sesuai Surat No. 1 Presiden Republik Indonesia. R-66/Pres/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 disampaikan kepada Presiden DPRRI. Hal itu sebenarnya sudah masuk dalam agenda rapat DPR RI yang berlangsung Rencana Pleno Pencalonan Kabupaten Pesisir Timur 2014. Saat ini, calon Kabupaten Pesisir Timur menjadi urutan kelima yang sedang dibahas dan secara hukum menjadi Daerah Otonom (DOB) baru.

Namun, pembahasan UU Kabupaten Pesisir Timur tidak terwujud. Terjadi keterlambatan hadir di rapat paripurna DPR RI akan menetapkan agenda RUU Otonomi Daerah (DOB) pada Senin 29 September Tahun 2014 merupakan tahun yang sulit di Jakarta. Majelis Umum akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi Lobi antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah pusat. Sementara itu, Perwakilan dari beberapa kandidat DOB meminta agar penundaan pengesahan dicabut Rancangan Undang-Undang DOB dan Menunggu Delegasi ke Anggota DPR RI Tahun 2014- 2019. Setelah keadaan rapat umum yang ricuh akibat pengunjuk mensyaratkan ratifikasi undang-undang DOB di setidaknya 21 kabupaten, sampai para Anggota dewan berdiskusi lagi. "Komisi II DPR RI Wakil Presiden Abdul Hakam Naja mengumumkan sebenarnya ada 21 daerah otonom baru yang dinilai pemerintah layak masuk. makmur tapi terhindar dari kecemburuan antar daerah, akhirnya disepakati RUU itu tidak dilanjutkan.⁵⁸ Pembahasan juga tidak bisa dipaksakan. Mengingat bahwa ada perbedaan antara undang-undang pemerintah daerah baru, undang-undang pemerintah lama berarti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Kemudian dilakukan amandemen terhadap UU No 23 Tahun 2004. Karena Perpu No.23 Pada tahun 2004, pemerintah daerah baru saja disahkan menjadi undang-undang. Dalam rangka pelaksanaan pemekaran wilayah, akhirnya dihentikan Pemerintah melalui penerapan kebijakan untuk melaksanakan moratorium perluasan Wilayah pada 2004. Ini terjadi pada masa transisi kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Jokowi Dodo. Sebagaimana dimaksud Sebuah bait, yang dia yakini disebabkan oleh perubahan alam psikologi kelompok elit yang berbeda, sehingga elit harus memerintah dengan penyerapan oleh penipuan massa dan Gunakan. Dan Mosca melihat para elit mengubah caranya Keterampilan elite dalam melakukan kontrol politik.⁶⁰ Memang jika kita cermati sebelum kebijakan moratorium, perjuangan untuk ekspansi di daerah ini secara bersamaan pada akhir runtime DPR RI dan DPR RI Presiden Elit memainkan peran besar dalam pemerintahan internal. Perebutan ekspansi sangat mempengaruhi akselerasi perluasan wilayah, namun sayangnya hal ini terjadi pada masa jabatan terakhirnya. Oleh karena itu, tidak dianggap tegas dalam menentukan kebijakan pemekaran daerah. Hal ini mencegah ratifikasi 65 daerah

otonom baru diajukan ke DPR RI hingga akhirnya debat dihentikan sementara dan dibahas Beralih ke DPR-RI berikutnya. Kemudian sampai hari ini pembahasannya Belum dibahas karena krannya belum dibuka moratorium perluasan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diuraikan dan dijelaskan pada bab Di masa lalu, wacana politik memperluas wilayah Pantai Timur Ini berfokus pada proses pembagian dan alasannya tidak dapat dibawa ke dalam lingkaran baru Setidaknya ada dua kesimpulan yang bisa ditarik dari sini:

1. Pemekaran wilayah pantai timur semula kembali kepada keinginan manusia dirinya sendiri. ingin perubahan di daerah tersebut Pemerataan pembangunan dan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah perubahan besar. Artinya, perluasan wilayah pantai timur bisa diharapkan membawa perubahan yang signifikan dalam segala aspek, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga semua aspek yang terkait dengan pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, birokrasi, ketenagakerjaan dll. Kemudian pembagian wilayah pantai timur tidak terjadi begitu saja Masyarakat itu sendiri Kepentingan politik juga terkait dengan upaya untuk mencapainya selain untuk mencapai tujuan yang sebenarnya memperoleh status dan kekuasaan baru di lembaga-lembaga negara.
2. Banyak pihak yang rupanya terlibat dalam proses pemekaran wilayah pantai timur tersebut seperti tokoh masyarakat, eksekutif, parlemen, partai politik, ormas Masyarakat dan masyarakat itu sendiri. dalam proses kerja plugin ini sejak diterimanya dokumen-dokumen terkait usulan perpanjangan sampai dengan pemberian mandat Presiden dan mengakhiri moratorium ekspansi sebelumnya proses panjang hingga 20 tahun. tapi untuk saat ini Kawasan Pantai Timur belum bisa menjadi kawasan baru. Jika Anda melihat gulungannya Terlihat elite lokal sudah meminta dukungan sejak awal proses pemekaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), DPRD dan pemerintah daerah ke bidang tengah.

Daftar Pustaka

- Bilbao-Jayo, A. (2018). Political discourse classification in social networks using context sensitive convolutional neural networks. *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 76–85.
- Choy, C. (2018). Online political public relations as a place-based relational practice: A cultural discourse perspective. *Public Relations Review*, 44(5), 752–761. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.05.006>
- Fetzer, A. (2018). 'What I would say to John and everyone like John is.': The construction of ordinariness through quotations in mediated political discourse. *Discourse and Society*, 29(5), 495–513. <https://doi.org/10.1177/0957926518770259>

-
- Foss, A. (2018). Climate change and political discourse: analysis of energy efficiency and conservation block grants in Dallas-Fort Worth. *Journal of Environmental Planning and Management*, 61(2), 230–248. <https://doi.org/10.1080/09640568.2017.1301894>
- Johnson, C. (2020). Gender, emotion and political discourse: masculinity, femininity and populism. *The Rhetoric of Political Leadership: Logic and Emotion in Public Discourse*, 16–33. <https://doi.org/10.4337/9781789904581.00009>
- Miller, H. T. (2020). Policy narratives: the perlocutionary agents of political discourse. *Critical Policy Studies*, 14(4), 488–501. <https://doi.org/10.1080/19460171.2020.1816483>
- Portillo, A. G. (2020). Social inclusion policies in Andalusia from a discursive and lexicometric perspective. A comparative analysis of the technical-political discourse. *Empiria*, 45, 75–111. <https://doi.org/10.5944/empiria.45.2020.26305>
- Richards-Gray, L. (2022). Political discourse and gendered welfare reform: a case study of the UK Coalition government. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 32(2), 358–376. <https://doi.org/10.1080/17457289.2020.1760283>
- Schlauffer, C. (2018). The Political Use of Evidence and Its Contribution to Democratic Discourse. *Public Administration Review*, 78(4), 645–649. <https://doi.org/10.1111/puar.12923>
- Singh, G. (2019). Political Discourse and the Planned City: Nehru's Projection and Appropriation of Chandigarh, the Capital of Punjab. *Annals of the American Association of Geographers*. <https://doi.org/10.1080/24694452.2018.1507816>
- Trimithiotis, D. (2018). Understanding political discourses about Europe: A multilevel contextual approach to discourse. *Discourse and Society*, 29(2), 160–179. <https://doi.org/10.1177/0957926517734425>